

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya terkait “Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat” dapat disimpulkan bahwa:

1. Kehadiran Rapat

Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas bagi mereka untuk menghadiri Musrenbang di tingkat kota. Mekanisme pengundangan, dukungan logistik, dan aksesibilitas yang telah diatur dengan baik mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan partisipasi inklusif. Namun, jumlah perwakilan mereka pada Musrenbang Kota sangat terbatas. Belum lagi kehadiran para penyandang disabilitas di tingkat bawah seperti Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan sangat jarang ditemukan. Pemerintah perlu menetapkan kuota representasi penyandang disabilitas di setiap tingkatan Musrenbang, dari Rembuk RW hingga Musrenbang Kota, demi memastikan keterlibatan yang lebih inklusif.

2. Keterlibatan dalam Diskusi

Penyandang disabilitas turut berpartisipasi dalam sesi Sidang Pleno dan Sidang Kelompok, namun waktu yang terbatas serta struktur diskusi yang formal sering kali menghambat kontribusi mereka. Meskipun pemerintah memberikan kesempatan untuk berbicara, banyak penyandang disabilitas merasa bahwa durasi tersebut tidak mencukupi untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara komprehensif. Terbatasnya waktu membatasi partisipasi optimal penyandang disabilitas, sehingga mengurangi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan forum Musrenbang khusus yang lebih inklusif untuk penyandang disabilitas.

3. Sumbangan Pemikiran

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk memberikan usulan dan gagasan dalam Musrenbang, dan pemerintah berusaha mengakomodasi masukan ini. Namun, keterbatasan anggaran dan perbedaan prioritas kebijakan menghambat realisasi usulan. Meski begitu, pemerintah memastikan semua masukan dicatat dalam notulen resmi untuk dipertimbangkan dalam Musrenbang tingkat provinsi. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan prioritas dengan alokasi anggaran tahunan yang terjamin untuk secara khusus memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

4. Tanggapan dan Penolakan

Respons pemerintah terhadap usulan penyandang disabilitas masih belum optimal. Persetujuan atau penolakan terhadap usulan sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penyandang disabilitas. Meski pemerintah berupaya menyampaikan hasil Musrenbang secara digital, keterbatasan akses teknologi justru memperdalam kesenjangan, menghambat penyandang disabilitas untuk memahami dan terlibat dalam proses ini. Pemerintah perlu menyediakan laporan hasil Musrenbang dalam format ramah disabilitas dan melakukan sosialisasi transparan untuk memastikan aspirasi penyandang disabilitas terakomodasi dengan adil.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menetapkan Kuota Representasi Penyandang Disabilitas di Setiap Tingkatan Musrenbang

Penyandang disabilitas berharap dilibatkan lebih aktif dalam forum tingkat bawah, sehingga suara dan kebutuhan mereka dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah perlu membentuk forum inklusif di setiap tingkatan, mulai dari RW hingga Kecamatan, sebagai ruang diskusi dan representasi formal di Musrenbang tingkat lebih tinggi. Langkah ini akan memastikan partisipasi yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan disabilitas dalam pembangunan.

2. Pembentukan Forum Khusus Penyandang Disabilitas

Guna mengatasi keterbatasan waktu yang mungkin membatasi diskusi, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membentuk forum Musrenbang khusus bagi penyandang disabilitas. Forum ini akan memungkinkan penyandang disabilitas berdiskusi lebih dalam mengenai isu-isu yang relevan dengan mereka, tanpa terburu-buru oleh batasan waktu. Selain itu, hasil dari forum khusus ini dapat dipertimbangkan dan digabungkan ke dalam agenda utama Musrenbang, sehingga lebih inklusif dan akomodatif.

3. Mengalokasikan Anggaran Tetap untuk Prioritas Penyandang Disabilitas

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan prioritas yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dengan alokasi anggaran yang terjamin setiap tahunnya. Kebijakan ini sebaiknya memasukkan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas utama dalam perencanaan anggaran, sehingga dukungan anggaran untuk penyediaan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas tidak terabaikan akibat prioritas kebijakan lainnya..

4. Peningkatan Transparansi dan Aksesibilitas Informasi

Untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas hasil Musrenbang bagi penyandang disabilitas, pemerintah harus menyediakan laporan hasil Musrenbang yang mudah diakses dan dalam berbagai format ramah disabilitas. Format ini dapat berupa teks sederhana, audio, braille, atau video dengan teks terjemahan. Selain itu, diadakan sesi sosialisasi khusus yang menjelaskan hasil Musrenbang secara terbuka dan memberikan informasi terkait alasan di balik setiap keputusan. Upaya ini akan memudahkan penyandang disabilitas dalam memahami hasil Musrenbang dan membangun rasa kepercayaan pada proses tersebut.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bintoro Tjokroamidjojo. (1984). *Perencanaan Pembangunan*. CV Haji Masagung.
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (R. Widada (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Elvera, & Astarina, Y. (2021). *Metodelogi Penelitian* (E. Mulyana (ed.); Edisi 1). Andi.
- Felix A. Nigro & Lloyd G. Nigro. (1971). *Pengantar studi public administration/ oleh Dwight Waldo ; terjemahan, Slamet W. Admosoedarmo* (Diterbitka). Djakarta : Tjemerlang.
- Ginandjar Kartasasmita. (1994). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memandukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. PT. Pustaka CIDES INDO.
- _____, (1997). *Administrasi pembangunan : perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*. LP3ES.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Hebert Alexander Simon. (1957). *Administrative behavior: a study of decision making processes in administration organizations* (2nd ed.). Macmillan.
- Isbandi, R. A. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas (dari pemikiran menuju penerapan)* (Edisi Pert). FISIP-UI Press.
- Leonard D. White. (1955). *Introduction to the study of public administration*. Macmillan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Moeljarto Tjokrowinoto. (1993). *Politik Pembangunan*. Tiara Wacana.
- Pasaribu. (1986). *Sosiologi pembangunan* (Edisi 2). Tarsito.

- Ralph C. and Plano, J. C. C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. In *John Wiley & Sons*. (Issue (2nd ed., pp. 45-118)). https://archive.org/details/public-administra0000chan_r4v2/mode/1up
- Riyadi, & Bratakusumah. (2005). *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Multi-grafika.
- Sondang P. Siagian. (1999). *Administrasi Pembangunan konsep, dimensi, dan strategi* (Edisi Kedu). PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: (untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Edisi 1). Alfabeta.
- Theresia, A., Andini, K., Nugraha, P., & Mardikanto, T. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta.
- Yeremias T Keban. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)* (2nd ed.). Gava Media.
- Yulaswati, D. V., Nursyamsi, F., Ramadhan, M. N., Palani, H., & Yazid, E. K. (2021). *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup “Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yudiris.”*

JURNAL ARTIKEL

- Akbar, I. (2018). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Lokal: Studi Di Kota Bandung. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 5(2), 101–108.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 216–224. <https://doi.org/10.4324/9781315255101-34>
- Bharata, R. W., Rani, U., Priyono, N., & Novitaningtyas, I. (2021). Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. *Integralistik*, 32(2), 83–88. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.28818>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation’s place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Dewi, R. I. (2022). Partisipasi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal SIKAP*, 8(02), 1–9. <http://ejournal.unwmataram.ac.id/sikap/article/view/1422%0A>

- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 159–176. <http://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Risyart Alberth. (2022). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 57–76.
- Setiawan, I. B. (2017). Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Kereta Api di Desa Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. *Jom Fisip*, 4(2), 1–15.
- Susilowati, E., Aisyaroh, N., & Wahyuni, S. (2021). Analysis of Factors Affecting the Fulfillment of Health Rights in Children With Disability. *Jurnal Kebidanan*, 9(2), 114. <https://doi.org/10.31983/jkb.v9i2.4092>

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

DOKUMEN

Berita Acara Sidang Kelompok Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Dokumen Laporan Rencana Kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Nota Dinas Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2024

Publikasi Data Kota Jakarta Pusat Dalam Angka Tahun 2024

WEBSITE

Alynudin, S. (2024). *Mikrotrans Belum Ramah Disabilitas Pengguna Kursi Roda*. DPRD Provinsi DKI Jakarta. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/mikrotrans-belum-ramah-disabilitas-pengguna-kursi-roda/>

Hasanah, N. (2024). *Kebutuhan Rusun bagi Penyandang Disabilitas Mengacu ke Perda Nomor 4 Tahun 2022*. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/kebutuhan-rusun-bagi-penyandang-disabilitas-mengacu-ke-perda-nomor-4-tahun-2022/>

Jabroni, S., Anto, & Yahya. (2023). *Forum Komunikasi Difabel Bangunharjo*. Website Kelurahan Bangun Harjo. <https://bangunharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/648-forum-komunikasi-difabel-bangunharjo>

Jupiter. (2024). *Dorong Pemenuhan Kerja bagi Penyandang Disabilitas*. DPRD Provinsi DKI Jakarta. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/dorong-pemenuhan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas/>

Qolbina, E. F. (2024). *Disabilitas Butuh Pelatihan Keterampilan yang Lebih Variatif*. DPRD Provinsi DKI Jakarta. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/disabilitas-butuh-pelatihan-keterampilan-yang-lebih-variatif/>